

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DAN RODA EMPAT TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

**DI SUSUN OLEH :
REZA PRIMANSYAH
10973006991**



**AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DAN RODA EMPAT TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARIMUN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Convrehensif Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

SKRIPSI
DI SUSUN OLEH :
REZA PRIMANSYAH
10973006991



AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013

ABSTRAK

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun

Oleh: Reza Primansyah

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel – variabel Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, Pajak Kendaraan Roda Empat yang berpengaruh secara bersama – sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun selama periode 2007 – 2011 yang mana dapat dilihat bahwa selalu terjadi peningkatan tiap tahunnya, dan pajak Kendaraan Bermotor ini mempunyai peran yang cukup penting dalam pendapatan pemerintah kota pekanbaru.

Berdasarkan hasil statistik nilai t – Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (x_1) 0,664 dalam hal ini t –hitung lebih kecil dari t -tabel 2.015. hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (x_1) tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun dan juga nilai t – Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (x_2) sebesar -0,754 dalam hal ini t -hitung lebih kecil dari t -tabel 2.015. hasil menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (x_2) tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun. Berdasarkan uji F Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat dapat ditunjukkan dengan angka 0,458. Berdasarkan hasil ini Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Karimun. Berdasarkan uji R^2 menunjukkan angka sebesar 0,314. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Karimun dapat dijelaskan variable Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (x_1), Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (x_2), Pendapatan Asli Daerah (Y)

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah S.A.W.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak sehingga selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terutama kepada yang teristimewa Ayahanda Awang Dulkahar dan Ibunda Raja Iriani Yanti serta Kakak ku Reka Peramita juga Adik ku Muhammad Hikmansyah atas motivasi dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Dony Martias SE,MM beserta staf dan jajarannya.

4. Bapak Khairil Hendri SE,MSi,Ak selaku pembimbing yang selalu memberikan nasehat,motivasi dan perbaikan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Hj. Oechi Nadira SE,M.AK,Ak selaku Penasehat Akademis (PA), yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan berlangsung sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan serta bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
7. Kepala dan Staf Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik Sri Aslinda yang senantiasa mendo'akan, menasehati, memotivasi, mendukung serta memberikan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teruntuk rekan-rekan anggota GPS yang selalu memberikan warna dalam perkulihan penulis di kampus.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi S1 tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendo'akan, menasehati, memotivasi, mendukung serta memberikan bantuan baik moril maupun materil selama penulis dalam proses perkuliahan.

12. Rekan-rekan sejawat diorganisasi IPPMKK dan HPM-TBK yang banyak memberikan pengalaman dan pelajaran yang tak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
13. Rekan-rekan yang ada di kost KHMC yang selalu memberikan semangat dan warna kehidupan kepada penulis selama di pekanbaru.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a dan dukungannya, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, semoga Allah SWT meridhai dan mencatatnya sebagai amal mulia. Amin

Pekanbaru, 02 Mei 2013

Penulis,

REZA PRIMANSYAH
NIM. 10973006991

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.4 Pengertian Pajak Daerah	13
2.5 Pendapatan Asli Daerah	14
2.6 Pengertian Pajak Daerah	19
2.7 Pengertian Kendaraan Bermotor	19
2.8 Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	20
2.9 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.10 Pajak Dalam Islam	27
2.11 Kerangka Teoritis.....	29
2.12 Model Penelitian	29
2.13 Hipotesis.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe penelitian.....	31
3.2 Populasi dan Sampel	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Metode Analisis	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	38
4.2 Deskripsi Data Penelitian	55
4.3 Analisis Kuantitatif Variabel Penelitian.....	57

4.4 Pengujian Hipotesis Metode Regresi Linear Berganda	61
4.5 Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memunggut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Instansi pemerintah dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan

bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assement system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Banyak jenis pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun perluasan obyek pajak dan hal ini masih belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan asli daerah. Pemerintah pusat juga telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang penerimaan di daerah. Diantaranya, melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Tapi masih banyak pajak yang tidak efektif dipungut dikarena suatu alasan sehingga menghambat pendapat daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar.

Kabupaten Karimun dengan perekonomian yang sedang berkembang pesat mempunyai penghasilan daerah yang besar salah satu sumber penerimaan terbesar Kabupaten Karimun adalah Pajak Kendaraan Bermotor,

tetapi dalam hal ini Kantor SAMSAT Kabupaten Karimun mendapatkan pemasukan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang ada di Kabupaten Karimun, sehingga untuk pembagian Anggaran untuk Dana Alokasi Umum dan Khusus terdapat hambatan, dengan banyak masyarakat tidak membayar pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor kadang mengalami penurunan dari sebelumnya, Penelitian ini cukup beralasan untuk dilakukan karena diharapkan dari temuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaran bermotor. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu mengoptimalkan pemberian pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan dan dukungan oleh berbagai pihak tentang kontribusi pajak kendaran bermotor yang semakin meningkat dihadapkan pada berbagai fenomena, yaitu: (a) Kurangnya responsif pemerintah dalam hal penagihan pajak, (b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan, (c) Kelemahan sumber daya manusia dalam memahami perpajakan.

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor Dinas Pendapatan Daerah bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Tanjung Balai Karimun
2007-2011

No	Thn	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5	6
1	'07	Pajak Kend Bermotor	4.600.000.000	4.924.911.941	107.06
2		Bea Balik Nama KB	5.000.000.000	4.900.045.500	98.00
			9.600.000.000	9.824.957.441	205.06
1	'08	Pajak Kend Bermotor	5.179.131.730	5.685.236.585	109.77
2		Bea Balik Nama KB	6.883.284.000	7.222.045.900	104.92
			12.062.415.730	12.907.282.485	214.69
1	'09	Pajak Kend Bermotor	6.500.000.000	6.755.892.236	103.94
2		Bea Balik Nama KB	6.964.000.000	6.367.606.450	91.44
			13.464.000.000	13.123.498.686	195.38
1	'10	Pajak Kend Bermotor	6.792.500.000	8.017.670.075	118.04
2		Bea Balik Nama KB	5.745.300.000	6.823.024.200	118.76
			12.537.800.000	14.840.694.275	236.8
1	'11	Pajak Kend Bermotor	9.538.606.730	909.819.200	102.42
2		Bea Balik Nama KB	7.206.862.500	755.351.800	120.58
			16.745.469.230	1.665.171.000	223

Sumber : Dinas Pendapatan KPPD Tanjung Balai Karimun

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karimun

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2007	108.336.682.607	184.342.259.568
2	2008	188.565.887.920	281.907.148.292
3	2009	254.377.205.856	296.771.411.917
4	2010	186.624.783.438	233.218.459.163
5	2011	192.361.917.752	240.819.873.680

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Dari beberapa penelitian tentang pajak daerah telah dilakukan diantaranya penelitian oleh Tusakdiah (2011) yang menyatakan bahwa dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua yaitu wajib pajak harus mengisi surat pendaftaran, penetapan pajak kendaraan, pembayaran kendaraan, penagihan pajak, sanksi administrasi pajak dan banyaknya masyarakat tidak mengetahui sistem tata cara pembayaran pajak kendaraan.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Yunus yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo” yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Bone Bolango dan sebaiknya sistem yang digunakan lebih diperketat supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga dapat menurunkan daftar tunggakan wajib pajak.

Dari dua penelitian diatas, peneliti ingin mencoba kembali meneliti kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Karimun karena seiring berkembangnya perekonomian masyarakat sudah mampu membeli kendaraan. Perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi dimana penelitian dilakukan di Kabupaten Karimun sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi lain, perbedaan berikutnya terletak pada populasi yang digunakan penulis adalah seluruh wajib pajak kendaraan roda dua dan roda empat sedangkan sebelumnya hanya roda dua,, tahun penelitian ini diambil dari tahun 2007 s/d 2011 penelitian sebelumnya hanya tahun 2009 s/d 2010. Cara pengukuran penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder dan hanya menelaah daftar wajib pajak yang membayar pajak dan tidak membayar pajak sedangkan penulis menggunakan cara pengukuran dengan menggunakan uji regresi linear sederhana, untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak menurut Islam ada dijelaskan di Surat At-Taubah ayat 103 dimana artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan semakin berkembangnya daerah Kabupaten Karimun maka secara tidak langsung semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat Serta mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan pajak

kendaraan bermotor roda dua dan roda empat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yg berjudul:

“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN RODA EMPAT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARIMUN “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun?
2. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karimun.
- b. Untuk mengetahui apakah Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat menjadi bahan masukan kepada kantor dinas pendapatan kabupaten karimun dalam memajukan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang populasi, sampel populasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, pengukuran variabel, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai hasil masalah dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai pajak kendaraan bermotor di kabupaten karimun.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diberikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan penulis atas analisa permasalahan yang terjadi seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro,(2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun definisi lainnya adalah Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir) ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya:

1. Iuran rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang),
2. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam hal ini pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah,
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi budgetair

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan di tunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.

Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0 %.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2002) dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

1. Official Asesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Asesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

3. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.4 Pengertian Pajak Daerah

Menurut undang – undang Pasal 1 No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 10 undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.5Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau yang di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasar undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 158 penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu

1. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan. Dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 157 huruf b tentang dana perimbangan :

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Penjelasan tentang Pasal 32 Tahun 2004 Pasal 157 di jelaskan di pasal 159 bahwa

a. Dana Bagi Hasil

1. Dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
 - b. Bea Perolehan Atas Hak T' tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
 - b. Penerimaan pertambangan. umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan
- d. dan penerimaan pungutan hasil perikanan
- e. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- f. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- g. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang DAU (Dana Alokasi Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk :

1. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar

2. prioritas nasional;
3. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
4. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
5. Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan:
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

1. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
2. Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Berdasarkan Pasal 165 Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan

dengan Peraturan Presiden. Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom. Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk “Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan social.”

2.6 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Sistem bagi hasil pajak provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 30% oleh provinsi pemungut.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 30% oleh provinsi pemungut.
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor, diserahkan kepada kabupaten/Kota paling sedikit sbesar 70% oleh provinsi pemungut.
- d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 70% oleh provinsi pemungut.

Komposisi bagi hasil tersebut di atas dapat diadakan perubahan sepanjang ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

2.7 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. (Marihot dalam Halimah,2005)

Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak Kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

2.8 Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah Kendaraan yang digunakan di jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor Roda Dua yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

2.9 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor secara umum adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan Kendaraan Bermotor. (Marihot,2005)

Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Pajak Kendaraan Bermotor ini akan dibahas juga Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor. Saat Terhutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi

oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA). Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara berpisah misalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA).
4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) pada provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada poin 3 diatas, keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan

Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)

a. Objek Pajak.

Objek Pajak PKB adalah Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam objek Pajak PKB adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan darat. (marihot 2005:140)

Pada PKB, tidak semua kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dikenakan Pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pihak-pihak dibawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor milik BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai Objek Pajak.
2. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaaran Bermotor oleh kedutaan, konsultan, Perwakilan Negara Asing dan sebagainya, ketentuan Tentang pengecualian pengenaan PKB bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
3. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur oleh peraturan Daerah.

Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan peraturan Daerah antara lain:

1. Orang Pribadi yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian.
2. BUMN yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
3. Pabrik atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Turis Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
5. Kendaraan pemadam kebakaran
6. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

b. Subjek Pajak.

Pada PKB, Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang berkenaan oleh Undang-Undang dan peraturan Daerah tentang PKB. Wakil pajak secara pribadi atas pembayaran pajak terutang.

c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Dasar Pengenaan.

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor(NJKB), yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasar Umum harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditentukan sebagai berikut:

- 1) Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satu daya.
- 2) Penggunaan Kendaraan Bermotor
- 3) Jenis Kendaraan Bermotor
- 4) Merek Kendaraan Bermotor
- 5) Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor
- 6) Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan, serta
- 7) Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.

b) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan

Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor dibawah ini:

- 1) Tekanan Gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/ad, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
- 2) Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
- 3) Jenis penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tidak atau 4 tidak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

4) Tarif

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pasal 5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, yaitu sebesar:

- 1) 1,5% untuk kendaraan Bermotor bukan Umum,
- 2) 1% untuk Kendaraan Bermotor Umum, yaitu Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

- 3) 0,5% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Besat dan alat-alat Besar.

2. Cara Perhitungan

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak, secara Umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak.} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

d. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak

1) Saat Terutang Pajak

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2) Masa Pajak.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor

lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekali dimuka untuk masa pajak 12 bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain Kendaraan Bermotor didaftarkan didaerah lain (Mutasi Daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

3. Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas Kendaraan Bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.10 Pajak Dalam Islam

Pajak menurut Islam dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tabel II. 3
Hasil Penelitian Sebelumnya

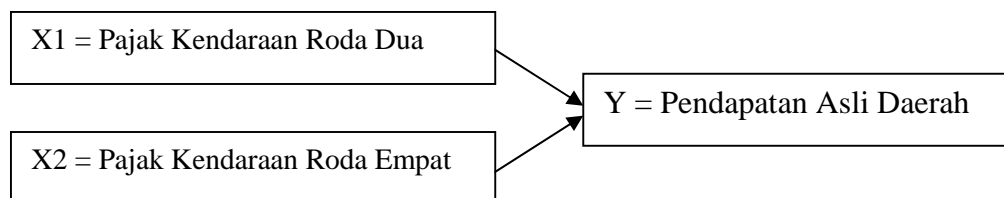
Penulis	Judul	Variabel/D dan I	Hasil Penelitian
Skipsi Halimah Tusakdiah	Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Pajak Kendaraan Bermotor adalah Variabel dependen sedangkan Dinas pendapatan adalah variabel independen	Dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor wajib pajak melakukan pendaftaran, penetapan pajak kendaraan, pembayaran, administrasi pajak dan banyak masyarakat tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak kendaraan sehingga banyak yang tidak membayar pajak
Jurnal Abdul Thalib Yunus	Analisi kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten bone bolango provinsi gorontalo	Variabel dependen kendaraan roda dua dan roda empat dan variabel independen pendapatan daerah	Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah bone bolango relatif besar selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2006 s/d 2009

2.11 Kerangka Teoritis

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor yang menunjang Pendapatan Asli Daerah.

2.12 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:



2.13 Hipotesis

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Thalib Yunus mengenai Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo menghasilkan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango relatif besar selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2006 s/d 2009.

Kendaraan roda dua sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat dan dapat dipastikan disetiap rumah memiliki kendaraan roda dua seiring meningkatnya pendapatan masyarakat dan para pengguna kendaraan roda dikenakan pajak kendaraan bermotor, sehingga pajak kendaraan bermotor

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pendapat asli daerah.

Oleh karena itu hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah :

Ha1 : Pajak kendaraan roda dua berpengaruh signifikan untuk pendapatan asli daerah.

Sedangkan Kendaraan roda empat di negeri ini juga mengalami peningkatan dalam jumlah seiring meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, para pengguna kendaraan roda empat diharapkan dapat membayar pajak sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu hipotesis yang kedua dalam penelitian ini adalah :

Ha2 : Pajak kendaraan roda empat berpengaruh signifikan untuk pendapatan asli daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. (Sugiyono,2007:14). Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara pajak kendaraan bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Karimun.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono,2007). Populasi penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kepulauan Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karimun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk :

1. Data PAD Kabupaten Karimun
2. Data Pajak Daerah Kabupaten Karimun

3. Data Pajak Kendaraan Bermotor
4. Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian

3.4 Metode Analisis

1. Metode Analisis Kuantitatif.

Metode analisis ini merupakan penganalisaan dengan menggunakan peralatan analisis. Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel tetapnya (dependen).

2. Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan Multiple Linear Regression sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2003) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal

ataukah tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik dan uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametik *kolmogorov-smirnov (K-S)*. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0.05 berarti data terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolonearitas

Pengujian multikolonearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel X tidak saling berkorelasi linear. Sesungguhnya multikolonearitas itu tetap ada pada setiap variabel independen, hanya saja harus dipastikan apakah multikolonearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation faktor (VIF)* untuk tiap-tiap variabel independen. Nilai *coff of f* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah $\text{tolerance} < 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} > 10$.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari autokorelasi.

Menurut Ghozali (2005) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson dimana: jika angka $D-W > dl < (k-du)$ berarti tidak terdapat gejala autokorelasi.

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian *variance* dari residualnya tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Berikut ini adalah persamaan Regresi Linier Berganda, dimana variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) variabel independennya adalah Kendaraan Roda Dua (X1) Kendaraan Roda Empat (X2). Dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel Terkait (Pendapatan Asli Daerah)

X1, X2 : Variabel Bebas I, II, (Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda empat).

A : Konstanta

b1, b2, : Koefisien regresi

e : Gagal (error)

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh

atau simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05, apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F dari tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini adalah 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya.(sugiyono,2007).

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum PAD adalah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

2. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).
3. Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua baik milik pribadi atau umum yang digunakan di jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan provinsi sebesar 30% kepada Kabupaten/Kota oleh Provinsi pemungut.
4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor roda empat baik pribadi maupun untuk umum yang digunakan di jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun di bentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 160 Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun.

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas public baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimundipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, 2 (dua) orang kepala sub bagian, 8 (delapan) orang kepala seksi dan 1 (orang) kepala UPTD, 1 (satu) orang kepala sub bagian UPTD, dan 36 (tiga puluh enam) orang pegawai, dan 2 (orang) tenaga honorer daerah dan 3 (tiga) orang honorer kontrak.

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) laki-laki

dan 18 (delapan belas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SLTP hingga S-2.

2. Visi dan Misi

a) Visi

Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016 mengarah pada tujuan pembangunan jangka panjang menengah nasional 2010-2014. Untuk menunjang Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Imam dan Taqwa”. Maju dan Berdaya saing diartikan sebagai Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif, dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan, serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berlandaskan imam dan taqwa diartikan sebagai Kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar beragama yang harmonis. Sehingga dapat untuk mendukung visi Kabupaten Karimun.

b) Misi

Keberadaan misi merupakan pengimplementasian dari visi yang telah ditetapkan dan harus disusun secara operasional dan sistematis, misi harus

sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh suatu visi. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

“Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal, meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan dan mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar sektor dan antar pihak”.

Secara umum misi tersebut diatas mengandung nilai-nilai pokok sebagai berikut :

- 1) Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun memfokuskan tugas dan fungsi pada penerimaan daerah secara optimal.
- 2) Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah.
- 3) Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun melaksanakan tugas pokok yang prima melalui keterpaduan antara pihak-pihak yang terkait dan harus dijaga secara harmonis dalam rangka meningkatkan penerimaan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok antara lain :

- 1) Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan.
- 2) Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan daerah.
- 3) Melakukan pengelolaan UPTD
- 4) Melaksanakan kegiatan lain di bidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh bupati.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- 2) Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas lingkup tugasnya.

4. Susunan Organisasi

Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pendataan dan Penetapan
- 4) Bidang Penagihan dan Pembukuan
- 5) Bidang Pendapatan lain-lain

6) Bidang Bagi Hasil Pendapatan

7) UPTD

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas, uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas.
- 2) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 3) Mengelola urusan rumah tangga Dinas.
- 4) Mengelola keuangan Dinas.
- 5) Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas
- 6) Menyusun rencana kegiatan Dinas
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas

- 8) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas

Sekretaris terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
 - a) Menyusun teknis ketatausahaan Dinas
 - b) Menyusun surat-menyurat Dinas
 - c) Melayani surat-menyurat Dinas
 - d) Menyusun kearsipan surat-menyurat Dinas
 - e) Melayani kerumah tanggaan Dinas
 - f) Melayani perlengkapan Dinas
 - g) Melaksanakan pelayananteknis administrasi kepegawaian dinas
 - h) Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas
 - i) Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai dinas
 - j) Melaksanakan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang ditugaskan oleh pimpinan.
- 2) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan dan keuangan Dinas, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana dan pengelolaan keuangan Dinas

- b) Melayani keuangan Dinas
- c) Menkoordinasikan penyusunan keuangan dinas dengan bagian keuangan pada sekretariat daerah
- d) Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan dinas
- e) Menyusun laporan keuangan dinas
- f) Menyusun rencana kegiatan dinas
- g) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas melaksanakan tugas lain perencanaan dan keuangan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pendataan dan penetapan menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyusun pedoman teknis operasional pendataan dan penetapan pajak dan retribusi
- b) Melaksanakan penerimaan pendataan dan melakukan penetapan pajak dan retribusi daerah
- c) Melakukan pendataan pendapatan dan penetapan pajak dan retribusi

- d) Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penerimaan pendapatan dan penetapan
 - e) Melakukan perhitungan penerimaan pendapatan
 - f) Merumuskan evaluasi dan pelaporan pendataan dan penetapan
 - g) Melakukan pemeriksaan penerimaan pendapatan
 - h) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendapatan dan penetapan pajak dan retribusi
 - i) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas
1. Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pendataan dan penetapan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- a) Merencanakan program pendataan dan penetapan
 - b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data wajib pajak dan penetapan
 - c) Melaksanakan penetapan wajib pajak dan retribusi
 - d) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendataan dan penetapan
 - e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pendataan dan penetapan

f) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

2. Seksi perhitungan dan pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- a) Merencanakan program perhitungan dan pemeriksaan pendataan
- b) Melaksanakan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
- c) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
- d) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
- e) Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
- f) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang penagihan dan pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penagihan dan pembukuan, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program dan petunjuk teknis operasional penagihan dan pembukuan
- 2) Melaksanakan penagihan dan menertibkan pembukuan
- 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi penagihan dan pembukuan.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan pendapatan dan tertib pembukuan pendapatan
- 5) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan pembukuan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
 - a) Seksi penagihan dan pembukuan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan program pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
 - 2) Melaksanakan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi penagihan dan pembukuan pendapatan daerah
 - 4) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah

- 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain terutama pihak kecamatan, kelurahan dan desa untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan daerah
 - 6) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
- b) Seksi pemeriksaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional pemeriksaan dengan pengendalian pendapatan daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- 1) Merencanakan program pemeriksaan dan pengendalian pendapatan daerah
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan penagihan dan penagihan tertib pembukuan
 - 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan pengendalian penagihan dan pembukuan
 - 4) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian penagihan
 - 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi lain untuk mempermudah pemeriksaan dan pengendalian penagihan

- 6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan Kepala Bidang.

e. Bidang Pendapatan Lain-lain

Bidang pendapatan lain-lain mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penerimaan pendapatan lain-lain, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan rencana penerimaan pendapatan lain-lain yang bersumber dari usaha daerah yang sah
- 2) Melakukan penerimaan pendapatan lain-lain dari usaha daerah termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah. Legalisasi surat berharga dan pendapatan lainnya yang sah diterima daerah
- 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan lain-lain yang sah diterima daerah
- 4) Melakukan penyusunan laporan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah diterima daerah
- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan pendapatan lain-lain
- 6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan Kepala Dinas
 - a) Seksi penerimaan Usaha Daerah dan BUMD mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan rencana penerimaan pendapatan lain-lain yang bersumber dari usaha

daerah dan pendapatan badan usaha milik daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dari usaha daerah dan dari badan usaha milik daerah
 - 2) Melaksanakan penerimaan yang bersumber dari usaha daerah dan badan usaha milik daerah.
 - 3) Melakukan evaluasi penerimaan dari usaha dan dari badan usaha milik daerah
 - 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penerimaan usaha daerah dan dari badan usaha milik daerah
 - 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan dari usaha daerah dan dari badan usaha milik daerah
 - 6) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
- b) Seksi legalisasi surat berharga dan pendapatan lain mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapan lain, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- 1) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan legalisasi surat berharga dan pendapatan lain yang sah

- 2) Melaksanakan penerimaan dari legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah
- 3) Melakukan evaluasi penerimaan dari legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penerimaan legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah
- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan dari legalisasi surat berharga dan pendapatan yang sah
- 6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan

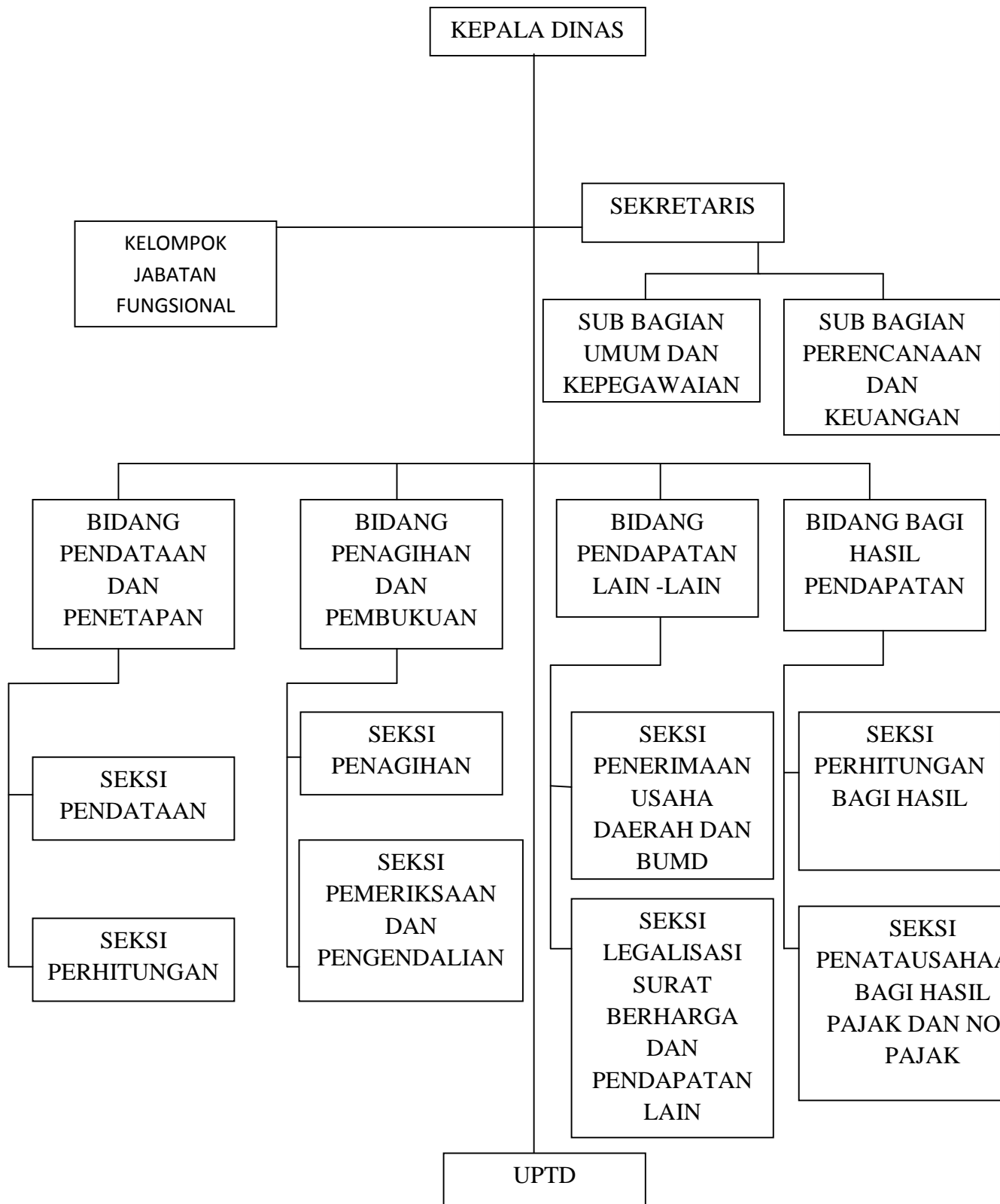
Bidang bagi hasil pendapatan mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan bagi hasil pendapatan yang menjadi hak daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan rencana bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- 2) Melakukan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan bagi hasil pajak dan non pajak

- 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- 6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
 - a) Seksi perhitungan bagi hasil pajak dan non pajak mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan perhitungan bagi hasil pajak dan non pajak, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan perhitungan bagi hasil
 - 2) Melaksanakan perhitungan bagi hasil
 - 3) Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk mempermudah perhitungan bagi hasil
 - 4) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
 - b) Seksi penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak

- 2) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 3) Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk mempermudah penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 5) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
KARIMUN



4.2 Deskripsi Data Penelitian

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Karimun selama periode tahun 2007 hingga 2011 terus mengalami peningkatan dan juga penurunan. Berikut ini adalah data tentang pencapaian yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak daerah dalam pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karimun:

Tabel IV. 4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Tanjung Balai Karimun
2007-2011

No	Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5	6
1	'07	Pajak Kend Bermotor	4.600.000.000	4.924.911.941	107.06
2		Bea Balik Nama KB	5.000.000.000	4.900.045.500	98.00
			9.600.000.000	9.824.957.441	205.06
1	'08	Pajak Kend Bermotor	5.179.131.730	5.685.236.585	109.77
2		Bea Balik Nama KB	6.883.284.000	7.222.045.900	104.92
			12.062.415.730	12.907.282.485	214.69
1	'09	Pajak Kend Bermotor	6.500.000.000	6.755.892.236	103.94
2		Bea Balik Nama KB	6.964.000.000	6.367.606.450	91.44
			13.464.000.000	13.123.498.686	195.38
1	'10	Pajak Kend Bermotor	6.792.500.000	8.017.670.075	118.04
2		Bea Balik Nama KB	5.745.300.000	6.823.024.200	118.76
			12.537.800.000	14.840.694.275	236.8
1	'11	Pajak Kend Bermotor	9.538.606.730	909.819.200	102.42
2		Bea Balik Nama KB	7.206.862.500	755.351.800	120.58
			16.745.469.230	1.665.171.000	223

Sumber : Dinas Pendapatan KPPD Tanjung Balai Karimun

Tabel IV. 5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karimun

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2007	108.336.682.607	184.342.259.568
2	2008	188.565.887.920	281.907.148.292
3	2009	254.377.205.856	296.771.411.917
4	2010	186.624.783.438	233.218.459.163
5	2011	192.361.917.752	240.819.873.680

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah pendapatan daerah setiap tahunnya dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat). Pendapatan pajak kendaraan bermotor yang terendah pada tahun 2007 senilai 4.924.911.941 sehingga pencapaian pendapatan asli daerah sebesar 184.342.259.568. Kemudian pendapatan pajak kendaraan bermotor tertinggi yaitu pada tahun 2010 senilai 8.017.670.075 sehingga pencapaian pendapatan asli daerah sebesar 233.218.459.163

4.3 Analisis Kuantitatif Variabel Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

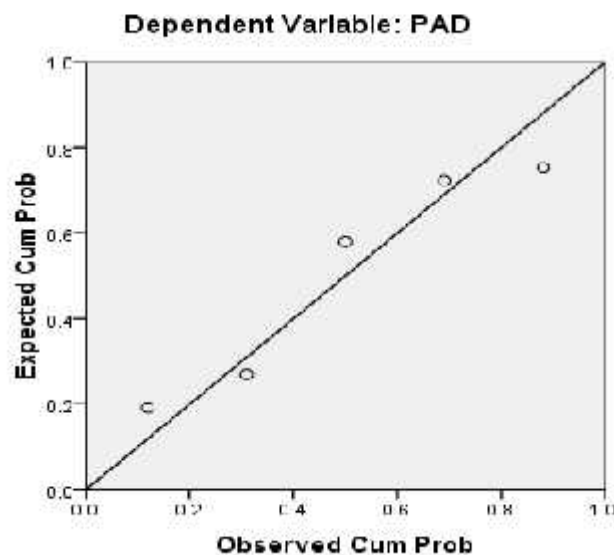
1.1 Uji Normalitas Data

Deteksi normalitas dilihat dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standarized Residual*. Pada gambar terlihat titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar. IV. 1

Diagram P-Plot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari gambar IV. 1 dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Artinya model regresi layak digunakan untuk memprediksi

variabel roda dua (x_1), roda empat (x_2) dan pendapatan asli daerah (y) di Kabupaten Karimun.

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariat khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka akan terdistribusi secara normal.

1.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 *for windows* dapat diketahui ada atau tidaknya gangguan multikolinearitas yang dapat dilihat secara umum yang ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan batasan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas sekitar 1 dan angka *tolerance* mendekati 1.

Tabel IV. 6
Hasil Uji Multikolinearitas Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat) terhadap PAD di Kabupaten Karimun

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Roda Dua (X_1)	.020	50.489	Terdapat Multikolinearitas
Roda Empat (X_2)	.020	50.489	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2013

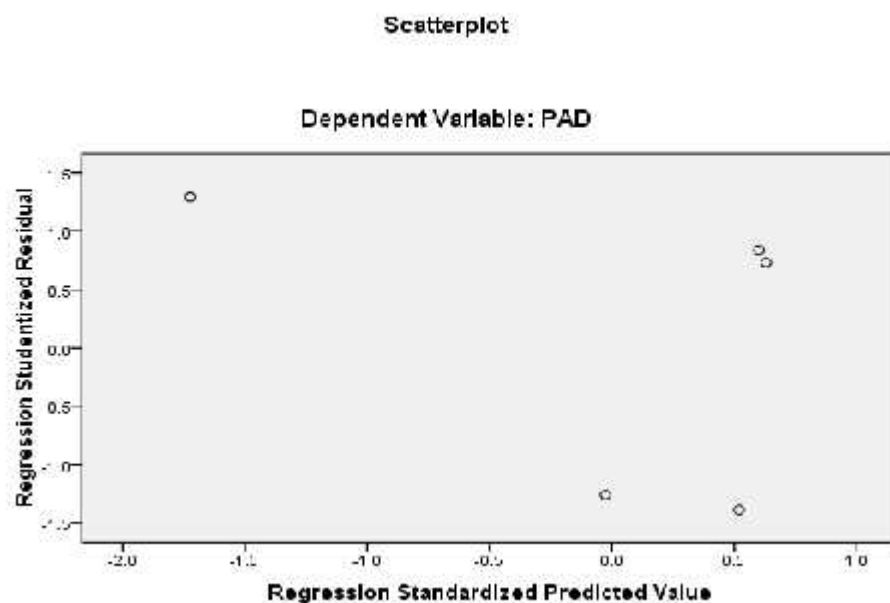
Tabel di atas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) disekitar angka 50, dan mempunyai angka *tolerance* mendekati 1 maka terjadi multikolinearitas. Artinya, setiap variabel independen tidak berdiri sendiri dan terjadi korelasi antara variabel.

1.3 Uji Heterokedasitas

Pengujian heterokedasitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heterokedasitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (scatterplot) tidak membentuk pola tertentu yang mana pola harus menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedasitas. Hasil uji model dapat dilihat dari gambar berikut ini.

Gambar. IV. 2

Diagram Pencar (*scatterplot*)



Dari grafik scatterplot, terlihat bahwa titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu y, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas heterokedasitas.

1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada abservasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi adanya autokorelasi ini adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Ketentuan uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika DW di bawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif
- b. Jika DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi
- c. Jika DW di atas +2, berarti autokorelasi negatif.

Tabel IV. 7

Hasil Uji Autokorelasi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat) terhadap PAD di Kabupaten Karimun

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.561 ^a	.314	-.371	1.84280E13	2.523
a. Predictors: (Constant), RodaEmpat, RodaDua					
b. Dependent Variable: PAD					

Sumber: Data Olahan SPSS, 2013

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka Durbin Waston sebesar 2.523 yang berarti tidak terjadi autokorelasi, hal tersebut karena angka Durbin Waston berada diatas +2 yaitu sebesar 2.523 dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini autokorelasi negatif.

4.4 Pengujian Hipotesis Metode Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dari masing-masing variabel bebas dan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t).

1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk membuktikan hipotesis secara parsial digunakan uji t yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara partial atau sendirir-sendiri dalam menjelaskan variabel terikat sehingga diketahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat yaitu PAD di Kabupaten Karimun dari kedua variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini. Uji t dapat diketahui berdasarkan data pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 8
Uji Secara Partial (Uji t) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat) terhadap PAD di Kabupaten Karimun

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	-3.284E13	9.955E13		-.330	.773
RodaDua	46504.589	70055.008	2.762	.664	.575
RodaEmpat	-49709.318	65897.978	-3.138	-.754	.529

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Olahan SPSS, 2013

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikat secara individual serta untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel

terikat dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang dijelaskan melalui hipotesis berikut ini:

- a) Berdasarkan statistik nilai t Kendaraan Roda Dua (x_1) sebesar 0.664 dalam hal ini t -hitung lebih kecil dari t -tabel 2,015 dengan tingkat signifikan mencapai 0,575. Hasil ini menunjukkan bahwa kendaraan roda dua tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun.
- b) Berdasarkan statistik nilai t Kendaraan Roda Empat (x_2) sebesar -0.754 dalam hal ini t -hitung lebih kecil dari t -tabel 2,015 dengan tingkat signifikan 0,529 Hasil ini menunjukkan bahwa kendaraan roda empat tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun

Analisis tingkat signifikan yang penulis uji tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun

2. Uji secara Simultan (Uji F)

Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikan konstanta secara simultan yaitu diduga pajak kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat secara bersama berpengaruh terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Karimun digunakan uji anova atau F test, dengan ketentuan: jika F hitung $>$ F tabel maka variabel kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, demikian juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel uji F Anova berikut ini:

Tabel IV. 9
Uji Secara Simultan (Uji F) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor
(Roda Dua dan Roda Empat) terhadap PAD di Kabupaten Karimun

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.114E26	2	1.557E26	.458	.686 ^a
	Residual	6.792E26	2	3.396E26		
	Total	9.905E26	4			

a. Predictors: (Constant), RodaEmpat, RodaDua

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Olahan SPSS, 2013

Data tabel IV. 5 diketahui F hitung sebesar 0.458 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0.686, sedangkan F tabel 19,00 pada tingkat signifikan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} = 0.458 > F_{tabel} = 19,00$ Artinya bahwa variabel kendaraan roda dua (x_1) dan kendaraan roda empat (x_2) tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (y).

3. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian hipotesis secara total digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 10**Uji Secara Simultan (Uji F) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat) terhadap PAD di Kabupaten Karimun**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.561 ^a	.314	-.371	1.84280E13	2.523
a. Predictors: (Constant), RodaEmpat, RodaDua					
b. Dependent Variable: PAD					

Sumber: Data Olahan SPSS, 2013

Tabel di atas menunjukkan nilai R sebesar 0.561 berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara variabel dependen dan independen cukup kuat, karena R sebesar 56%. Nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,314 artinya 31,4% dari Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Penggunaan teknik data regresi berganda pada penelitian ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat terhadap PAD di Kabupaten Karimun. Berdasarkan tabel di bawah ini maka diperoleh model persamaan analisis jalur sebagai berikut:

Tabel IV. 11

Hasil Regresi terhadap Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat) terhadap PAD di Kabupaten Karimun

Model	Variabel	B
1	(Constant)	-3.284E13
	Roda Dua	46504.589
	Roda Empat	-49709.318

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Olahan SPSS, 2013

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistic didapat sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y (\text{PAD}) = -3.284\text{E}13 + 46504.589 X_1 + (-49709.318) X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Koefisien jalur variabel kendaraan bermotor roda dua (x_1) = 46504.589 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD di Kabupaten Karimun. Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel pajak kendaraan bermotor roda dua maka PAD Kabupaten Karimun akan naik sebesar 46504.589 satuan dengan anggapan bahwa variabel yang lain konstan.

- 2) Koefisien jalur variabel kendaraan bermotor roda empat (x_2) = -49709.318 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD di Kabupaten Karimun. Tanda negatif menunjukkan koefisien arah hubungan yang negatif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel pajak kendaraan bermotor roda empat maka PAD Kabupaten Karimun akan menurun sebesar -49709.318 satuan dengan anggapan bahwa variabel yang lain konstan.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun adalah variabel pajak kendaraan bermotor roda dua 2,015
2. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Karimun.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak Kendaraan Bermotor Roda dua dan roda empat memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber

penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun. Hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan statistik nilai T pajak kendaraan bermotor roda dua (x_1) sebesar 0,664 dengan signifikan sebesar 0,575 hasil ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor roda dua tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun
2. Berdasarkan statistik nilai T pajak kendaraan bermotor roda empat (x_2) sebesar -0,754 dengan tingkat signifikan 0,529 hasil ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor roda empat tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun
3. Berdasarkan statistik nilai F pajak kendaraan bermotor roda dua (x_1) dan roda empat sebesar 0,458 dengan tingkat signifikan 0,686 hasil ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor roda dua tidak mempengaruhi PAD di Kabupaten Karimun
4. Variabel pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan

koefisien korelasi (R^2) sebesar 31,4% berarti hubungan variabel dependen terhadap variabel independen berpengaruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran:

1. Disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun agar dapat lebih memaksimalkan pendapatan PAD untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Kabupaten Karimun
2. Disarankan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.
3. Disarankan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun agar dapat bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda.
4. Disarankan kepada masyarakat wajib pajak dan pemilik usaha daerah Kabupaten Karimun agar melakukan pelunasan pembayaran pajak demi kemajuan Kabupaten Karimun
5. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat At-Taubah.

Dwi, novanti. 2010, *Pengaruh Insentif BBN KB dan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Surabaya Barat*, Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.

Hidayat, Rahmat. 2012, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Sulawesi Tengah.

Ghozali,imam.2006, *aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, edisi IV*. Badan penerbit universitas diponegoro,semarang.

Mardiasmo. 2001, *Perpajakan Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta. Andi CV

Mardiasmo. 2008, *Perpajakan Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta. Andi CV

Mardiasmo. 2009, *Perpajakan Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta. Andi CV

Marihot. 2005, *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*, Jakarta. Pantialo Lestari Raya Grafindo

Pandiangan, Liberti. 2005, *Undang-Undang Perpajakan edisi revisi*, Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Tanjung Pinang

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011

Pudyat, Sri. 2008, *Hukum Pajak edisi revisi*, Yogyakarta

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung. CV Alfabeta.

Thalib, Abdul. 2010, *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolanggo di Provinsi Gorontalo*, Gorontalo. UMI

Tusakdiah, Halimah. 2011, *Tata Cara Pemunggutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau*, Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Undang – undang No 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Bandung. Citra Umbara

Waluyo, 2002, *Pajak Indonesia edisi I*, Jakarta. Salemba Empat